

**PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM MENYIASATI PERDA NO 11 TAHUN 2005**

PASAL 8 AYAT 1,2,3

(Studi: PKL di Jalan Pasar Raya Padang)

SKRIPSI

Oleh:

MURNI YULIA SUSANTI

04 191 042



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2008**

ABSTRAK

MURNI YULIA SUSANTI, 04191042. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Menyiasati Perda No.11 Tahun 2005 Pasal 8 Ayat 1, 2, 3. Pembimbing I Dra. Dwiyanti Hanandini. M.si. dan pembimbing II Machdaliza Masri. SH. M.si.

Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 8 Ayat 1, 2, 3 merupakan salah satu bentuk peraturan yang terdapat di Daerah Kota Padang yang mengatur tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat (Tribun Ramas) masih banyak para pedagang kaki lima yang berdagang mempergunakan fasilitas publik yang tidak diperuntukkan bagi pedagang, seperti trotoar, jalan dan tempat-tempat parkir, sehingga mengganggu kenyamanan penggunaan fasilitas publik lainnya. Untuk itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Menyiasati Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 8 Ayat 1, 2, 3. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 8 Ayat 1, 2, 3 terhadap pedagang kaki lima, Alasan-alasan pedagang kaki lima mengabaikan Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 8 Ayat 1, 2, 3. Serta mengetahui dampak keberadaan pedagang kaki lima bagi pemilik toko, masyarakat pengguna jalan dan pengguna parkir di Jalan Pasar Raya Barat Padang. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian lain dalam mengembangkan konsep sosiologis tentang perilaku pedagang kaki lima dalam dalam menyiasati sebuah kebijakan..

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dalam pengumpulan data digunakan teknik Observasi dan wawancara mendalam (tidak berstruktur). Teori yang digunakan adalah Teori Exchange dari George Homans.

Dari Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Perda No.11 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 1, 2, 3 belum efektif karena masih belum adanya suratkeputusan dari Walikota tentang penzoningan lokasi untuk pedagang kaki lima. Selain itu terdapat konflik antara Dinas Pasar dan Dinas Perhubungan tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keberadaan pedagang kaki lima di lokasi parkir Jalan Pasar Raya Barat Padang. Perilaku pedagang kaki lima di lokasi tersebut bervariasi dapat dilihat dari produk yang dijual, sarana yang digunakan dan waktu berdagang mereka. Alasan pedagang mengabaikan Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 8 Ayat 1, 2, 3 tersebut adalah karena alasan kebutuhan ekonomi, tidak sampainya sosialisasi perda kepada mereka serta pemerintah belum bersikap tegas dalam menerapkan aturan. Dapat juga diketahui bahwa keberadaan pedagang kaki lima tersebut memiliki dampak terhadap pemilik toko, pengguna parkir dan pengguna jalan. Umumnya mereka menginginkan pedagang kaki lima tersebut dipindahkan ketempat lain karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan wawancara serta analisis data yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku Pedagang kaki lima dibentuk oleh pengetahuan, sikap dan tindakan dalam menyiasati Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 8 Ayat 1,2,3. Perilaku pedagang kaki lima ini juga berkaitan dengan para pelaku lain, yaitu Aparat Pemerintah yang terlibat, pemilik toko, pemakai jalan dan pengguna parkir.
2. Dalam implementasi program pemerintahan melibatkan sejumlah pembuatan kebijaksanaan, yaitu Dinas Pasar, Satpol PP yang melakukan penertiban serta Dinas Perhubungan. Dalam Implementasi kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 8 Ayat 1,2,3, diketahui bahwa ada konflik antara Dinas Pasar dan Dinas Perhubungan tentang siapa yang paling bertanggungjawab atas keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Pasar Raya Barat tersebut.
3. Alasan Pedagang Kaki Lima Mengabaikan Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Pasal 8 Ayat 1,2,3 karena alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi, pemerintah masih bersikap longgar dalam penerapan aturan tersebut kepada pedagang kaki lima dan tidak sampainya sosialisasi Perda kepada pedagang serta tidak ada penzoningan (penetapan lokasi) tempat berdagang untuk para pedagang, mana tempat yang boleh untuk berdagang dan mana tempat yang tidak boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, Solichin. 1990. **Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afrizal, MA. 2005. **Pengantar Metode Penelitian Kualitatif**. Padang: Labor Sosiologi.
- Alfian. 1990. **Kemiskinan Di Indonesia**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Damsar. 1997. **Sosiologi Ekonomi**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunn, N., William. 2000. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Firdausy, Mulya Carunia, 1995. **Pengembangan Sektor Informal PKL Di Perkotaan**. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas.
- Geertz, Clifford. 1989. **Penjaja dan Raja**. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Gilbert, Allan. 1996. **Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ke Tiga**. Jakarta: Tiara Wacana.
- Johnson, D. Paul. 1986. **Teori Sosiologi Klasik dan Modern**. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1997. **Metode Penelitian Sosial**. Yogyakarta: UGM.
- Mannase, Malow. 1985. **Metode Penelitian Sosial**. Jakarta: Karanita VT.
- Manning, Chris dan TN., Effendi. 1985. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal Di Kota**. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Mayer, R., Robert dan Greenwood Ernest. 1984. **Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial**. Jakarta: CV. Rajawali.
- Moleong, J., Lexy. 1989. **Metedologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rasdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1992. **Metode penelitian Sosial**. Yogyakarta: UGM.
- Parsons, Wayne. 2005. **Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan**. Jakarta: Kencana.